



Administrasi Tata Kelola dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Romaulina Simanjuntak¹, Elfrianto², Yusmidani³, Vivery Saragih⁴

^{1,2,3,4}Department of Management Education, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: romaulinasimanjuntak@gmail.com¹, elfrianto@umsu.ac.id², yusmidani@gmail.com³, viverysaragih1972@gmail.com⁴

Abstrak

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad sama artinya dengan kata to (dalam bahasa inggris), yang berarti ke atau kepada. Dan ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti "melayani", "membantu", atau mengarahkan". Jadi to administer berarti "mengatur", "memelihara" atau "mengarahkan". Jadi, kata "administrasi" diartikan sebagai: suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur kegiatan untuk mencapai suatu tujuan¹ (Endang Sri Budi Herawati dan Adiman. *Tata Kelola Administrasi Persekolahan*. (Jawa Timur: Qiara Media, 2020). Hal 1). Sedangkan tata kelola adalah merupakan bagian dari proses manajemen atau kepemimpinan berupa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pengawasan dan penilaian Pendidikan. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya, ada tiga pilihan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, *pertama*: Mandiri Belajar, *Kedua*: Mandiri Berubah, *Ketiga*: Mandiri Berbagi. Implementasi kurikulum merdeka adalah berupa kegiatan pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dengan baik dan sesuai kaidah Administrasi tata Kelola. Tata kelola yang baik akan membantu kesiapan kepala sekolah, guru, dan seluruh stake holder dalam mengimplementasikan kurikulum dengan baik.

Kata kunci: *Administrasi, Tata Kelola, Implementasi Kurikulum Merdeka*

Abstract

The word administration comes from the Latin which consists of the words ad and ministrare. The word ad has the same meaning as the word to (in English), which means to or to. And ministrare has the same meaning as the word to serve or to conduct which means "to serve", "assist", or direct. So managing means "managing", "maintaining" or "directing". So, the word "administration" is defined as: an activity or effort to help, serve, direct, or organize activities to achieve a goal (Endang Sri Budi Herawati and Adiman. *Governance of School Administration*. (East Java: Qiara Media, 2020). 1). Meanwhile, governance is part of the management or leadership process in the form of planning, organizing, implementing, directing, supervising and evaluating educational activities. The independent curriculum is a learning method that refers to the talent and interest approach. Students can choose what subjects they want to learn according to their passion, there are three choices in the implementation of the Independent Curriculum, first: Independent Learning, Second: Independent Change, Third: Independent Sharing. The implementation of the independent curriculum is in the form of curriculum implementation activities at the education unit level properly and in accordance with the principles of Governance Administration. Good governance will help the readiness of school principals, teachers and all stakeholders in implementing the curriculum properly.

Keywords: *Administration, Governance, Implementation of the Independent Curriculum*

Keywords: *Administration, Governance, Implementation of the Independent Curriculum*

PENDAHULUAN

Administrasi harus ditata sebaik baiknya agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, salah paham dan kompetisi negative, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Tata kelola merupakan bagian dari proses manajemen administrasi atau kepemimpinan.. Manajemen administrasi adalah pengelolaan terhadap seluruh kepentingan intitusional yang bersifat administrative berupa tindakan yang mengatur atau mengelola seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi. Henry Fayol menyatakan ada beberapa langkah dalam proses manejemen administrasi yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Dalam pelaksanaanya, tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat dalam lembaga tersebut, baik sebagai Lembaga pengelola maupun pengguna.

Tata kelola atau pengelolaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Dalam tata kelola Lembaga seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka satuan pendidikan sekolah membutuhkan tata kelola yang baik, berinovasi dan sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman. .

Tata kelola pendidikan menjadi salah satu manajemen pendidikan yang dapat merubah tatanan kehidupan sekolah. Makin baik sebuah tatanan kehidupan sekolah yang merupakan pengejawantahan dari tata kelola pendidikan akan berdampak pada peningkatan kinerja sekolah. Dalam tata kelola pendidikan, diperlukan satu tatanan manajemen yang melaksanakan etika, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga unsur tersebut harus dapat dilaksanakan secara terpadu oleh kepala sekolah sebagai pelaksana tata kelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan .

Banyak definisi mengenai tata kelola organisasi, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Dalam pelaksanaanya, tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat dalam lembaga tersebut baik sebagai lembaga pengelola maupun pengguna. Dalam tata kelola lembaga seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Tata kelola (governance) tidak terlepas dari prinsip prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola yang baik (bahasa inggris, Good Governance) adalah serangkaian proses yang berlaku untuk menentukan keputusan

organisasi. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya (Nurfadlilah, 2020). Dalam pengelolaan sekolah, Good Governance lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat (Blandford & Welton, 1999).

Pengelolaan sekolah ialah proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya sekolah adalah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sedangkan administrasi sekolah adalah upaya pengaturan dan pendaayagunaan seluruh sumber daya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan disekolah secara optimal.

Pelaksanaan pengelolaan sekolah yang optimal dapat digunakan konsep pengelolaan pendidikan moderen dengan prinsip desentralisasi mencakup dua konsep dasar yaitu : (1) Prinsip pola asuh/bimbingan yang baik dan benar (good governance) dan (2) Manajemen efektif dan efisien.

METODE

Metode penelitian merupakan hal penting dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini dapat di sebut pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan mendeskripsikan dan menguraikan merancang pembelajaran organisasi, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu *library research* atau yang dikenal dengan studi pustaka yaitu peneliti menghimpun berupa data dengan membaca, menelaah, dan menganalisis dari buku yang berjudul Administrasi Tata Kelola Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi dalam Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pencapaian tujuan sekolah itu sendiri dan memenuhi amanat tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan administrasi di sekolah dilaksanakan dengan profesional dengan tata kelola yang baik. Unsur pelaksana tata kelola yang baik di sekolah di selenggarakan oleh Kepala Sekolah, Staff tata usaha, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian , guru dan stake holder yang terkait.

Dalam tata kelola yang baik di sekolah, kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin perubahan pembelajaran, penyelia, manajer, administrator, pengambil keputusan dan entrepreneur . Dalam hal pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab memimpin, menjaga kualitas pembelajaran, memberikan supervisi teknik pembelajaran guru dan memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa untuk melakukan perbaikan. Sejak tahun 2021 maka perubahan dalam pembelajaran di Indonesia terjadi perkembangan yang luar biasa dan bisa dikatakan mengalami disrupsi. Dalam masa pandemi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan pembelajaran secara daring dan memberikan keleluasaan guru dan sekolah dalam mengelola pembelajaran di satuan pendidikan . Salah satu yang menjadi perubahan yang terjadi adalah kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya adalah implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan mulai dari Sekolah dasar, sekolah menengah m pertama dan sekolah menengah atas. Kurikulum yang disediakan kepada sekolah adalah Kurikulum Merdeka dengan 3 opsi yaitu Merdeka Belajar , Merdeka Berubah dan Merdeka Berbagi.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada guru dan seluruh potensi administrasi kepada guru untuk implementasi kurikulum Merdeka. Dukungan kepala sekolah yang diberikan dapat berupa perencanaan penggunaan sumber dana sekolah , sumber daya manusia , sumber daya lainnya. Bentuk penggunaan dana dengan mengalokasikan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet, bahan – bahan ajar, menyediakan pelatihan bagi guru dalam pembuatan modul, penyediaan sarana prasarana seperti komputer, laptop dan atau gawai yang dapat dipakai oleh guru

maupun siswa . Pelaksanaan pelatihan guru harus mempertimbangkan pembelajaran abad 21 yang menekankan 4 C yaitu Colaborative, Critical Thinking, Comunication Skill, dan Creativity . Perubahan paradigma di bekerja dan mengajar di dorong dengan memberikan pelatihan penggunaan pemanfaatan internet dan digitalisasi dokumen dan media ajar guru.

Dalam pelaksanaan tata kelola implementasi kurikulum merdeka ini kepala sekolah harus mampu melaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, terbuka, pendelegasian, kesetaraan dengan memberikan kesempatan pelatihan bagi setiap guru , respons dengan perubahan kurikulum dan efektif dan efisien.

Pada pelaksanaan pengelolaan sekolah yang optimal dapat digunakan konsep pengelolaan pendidikan moderen dengan prinsip desentralisasi mencakup dua konsep dasar yaitu : (1) Prinsip polaasuh/bimbingan yang baik dan benar (good govermance) dan (2) Manajemen efektif dan efisien. Setiap penerapan suatu kegiatan kepengawasan baik itu yang bersifat akademik maupun manajerial sedikitnya dua belas item yang harus dipenuhi.

Kedua belas item tersebut sebagaimana dikembangkan sebagai berikut (Usman dan Rokhmaniyah, 2007)

- a. Akuntabilitas (adanya rasa tanggungjawab), yaitu munculnya suatu kegiatan kepengawasan yang terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan proses dan hasilnya. Hal ini dianggap perlu ketika masyarakat umum, khususnya dunia pendidikan sudah mulai sadar dan mampu melihat secara konkrit kualitas suatu sekolah yang diselenggarakan secara efektif.
- b. Keterbukaan (transparant). Bahwa dalam pelaksanaan kepengawasan terhadap sekolah hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi baik selama perencanaan penerapan proses maupun dari hasil kepengawasan.
- c. Membuka peran semua pihak (participation). Prinsip ini mengacu pada daya dukung yang dapat diberikan oleh berbagai pihak baik yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan maupun yang merasa peduli terhadap pendidikan dalam segala segi khususnya aspek-aspek kepengawasan
- d. Kesederajatan/kesetaraan (equality). Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang hendaknya diperoleh dan dimiliki oleh setiap orang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, kondisi fisik, dan usia
- e. Kepekaan/kesegaran merespon (responsiveness) terhadap semua tuntutan perkembangan yang wajib dan rasional
- f. Penataan hukum (rule of law) bahwa pelaksanaan pendidikan yang baik hendaklah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung- jawabkan baik secara hukum maupun legal formal.
- g. Efisiensi dan efektifitas dalam melakukan setiap pekerjaan kepengawasan sekolah sangat diperlukan mengingat tujuan utama kepengawasan manajerial adalah untuk melihat secara jelas kondisi nyata yang terjadi di sekolah sehingga tercipta sebuah lembaga pendidikan yang mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Visi strategis/memandang jauh kedepan dalam hal-hal yang paling strategis dan menentukan. Kepala sekolah yang visioner akan mampu melejitkan sekolahnya dengan dukungan pengawasan yang optimal dari pengawas pendidikan.
- i. Pengawas pendidikan hendaklah menjunjung tinggi sikap profesionalisme dalam melakukan semua pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Hal ini menjadi suatu keharusan, mengingat tugas kepengawasan dalam mengiringi institusi pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, tidaklah mudah.

- j. Entrepreneurship dalam setiap melakukan pekerjaan secara efektif, berani memikul resiko, siap menghadapi perubahan dan memandang jauh kedepan
- k. Budaya organisasi terdiri dari prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai budaya organisasi sekolah dan seluruh apratur penyelenggaranya sebagai wadah pengembangan nilai kebersamaan, koordinasi dan keterpaduan kerja
- l. Kepedulian pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sekolah yang sudah menajdi keputusan bersama.

Usman dan Rokhmaniyah (2007) mengemukakan bahwa konsep manajemen efektif adalah Manajemen Berbasis Sekolah yang berangkat dari asumsi bahwa ujung tombak peningkatan mutu pendidikan berada di sekolah. Agar Manajemen Berbasis Sekolah berjalan efektif dan efisien, sekolah minimal harus memenuhi tiga syarat manajemen efektif, yaitu:

- a. Didelegasikan dan diserahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan secara proporsional di sekolah, meliputi kurikulum, teknologi, pengambilan keputusan taktis dan strategi sekolah, penggunaan fasilitas belajar, usul pengadaan, pemanfaatan, dan peningkatan Sumber Daya Manusia, biaya dan waktu.
- b. Didukung oleh unsur masukan/input pendidikan yang sesuai dengan tuntutan mutu pendidikan.
- c. Didukung oleh kemampuan profesional pendidikan yang mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan.

Tata kelola pendidikan mencakup berbagai aspek seperti kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan, pendidikan karakter, dan komponen-komponen lainnya. Dasar dari tata kelola pendidikan yang baik (good governance) adalah adanya tanggung jawab, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan pola keterbukaan dan kolaborasi serta koordinasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan khususnya di SMA, maka samangat masyarakat mau membantu sekolah sangat besar. Peluang ini dapat dilakukan dengan cara kolaborasi dan saling percaya bahwa tata kelola pendidikan di SMA dilaksanakan secara transparan, terbuka, partisipasi, dan akuntabel sebagai unsur utama dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan yang baik

Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan pengembangan yang dikeluarkan Kemdikbudristekdikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Kebijakan merdeka belajar menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum juga dikenal dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Adapun yang merupakan ciri khas Kurikulum adalah sebagai berikut :

- a. Guru Lebih Leluasa
 Dalam kurikulum merdeka belajar, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Guru juga bisa membuat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran
- b. Sekolah Harus Membantu Sumber Daya Manusia Guru
 Terkait dengan kurikulum ini, sekolah atau lembaga pelaksana memiliki peranan untuk membuat sebuah rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, sekolah dituntut untuk membantu sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya dengan memberikan berbagai pelatihan bagi para guru. Pelatihan tersebut mulai dari tingkat pemahaman terhadap kurikulum, konsep dan juga tahap

implementasinya. Termasuk adanya sebuah praktik nyata yang dilaksanakan oleh guru. Sehingga bukan hanya pengetahuan saja yang menjadi output, namun juga pemahaman aplikatif.

Tahapan Implementasi Penerapan Kurikulum Merdeka

Kemendikbud RI melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Dr. Iwan Syahril, Ph.D mengatakan, terkait pilihan implementasi kurikulum merdeka, Kemendikbud telah menyiapkan jalur untuk membantu tahap kesiapan setiap satuan Pendidikan.

Tiga jalur tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing satuan pendidikan, yakni:

1. Mandiri Belajar

Pilihan mandiri belajar akan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa bagian atau prinsip-prinsipnya saja tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan PAUD, Kelas 1, Kelas VII, dan Kelas X.

2. Mandiri Berubah

Jalur kedua akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, Kelas 1, Kelas VII, dan Kelas X.

3. Mandiri Berbagi

Sementara yang ketiga, sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Jalur ini juga memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, Kelas 1, Kelas VII, dan Kelas X.

Dalam merdeka belajar, tata kelola ditekankan ada proses pembelajaran secara online antara guru dan siswa. Sementara tata kelola oleh kepala sekolah dalam mengatur aktifitas guru dan siswa terutama dalam penggunaan sarana dan fasilitas sekolah diatur berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Di sini peran guru sangat penting karena tanpa guru maka proses belajar siswa sulit dilaksanakan untuk memenuhi proses interpretasi, refleksi dan proses pemikiran secara mandiri. Untuk itu guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik secara sederhana dan tidak berbelit belit yang menghabiskan waktu guru berjam jam dan mengakibatkan guru tidak punya waktu banyak untuk menyiapkan materi dan metode pembelajaran yang diajarkan

Dalam implemnetasi Kurikulum Merdeka kepala sekolah mendorong tim untuk meningkatkan kompetensi Creativity, collaborative communication, critical thinking (4 C) dan ditambah dengan compation logic (kebatinan) kepada murid dan guru-guru Kepala sekolah perlu melakukan kepemimpinan: antara lain perubahan paradigma dari penguasa, pengendali (regulator) menjadi pelayan bagi guru dan siswa.

SIMPULAN

Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala Sekolah dan guru disekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi misalnya Dinas Pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai propinsi memerlukan data untuk pelaporan yang lebih

tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang. Di tingkat pusat (nasional) data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian (evaluasi), dan keperluan administrasi lainnya

Perubahan dalam tata kelola sekolah merupakan suatu kepastian dan tidak dapat dihindarkan. Di era pandemi maka terjadi percepatan yang luar biasa dalam pelaksanaan administrasi di sekolah. Tetapi secara garis besar maka prinsip - prinsip tata kelola masih relevan. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan pembelajaran di sekolah dapat melakukan percepatan perubahan di sekolah terutama dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah sebagai tuntutan.

Kepala sekolah dalam menerapkan tata kelola dapat secara efektif melakukan tugas sebagai administrator di satuan pendidikan dengan menerapkan pola pembelajaran abad 21. Guru diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Perubahan mind set dimulai oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah berperan sebagai pelayan perubahan dan bukan lagi sekedar regulator.

DAFTAR PUSTAKA

- Janna, N. M., A., kurnia, A. d., & Arsyam, M. (2021, January 14). *Administrasi Keuangan Dalam Pendidikan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hmvcf>
- Neta, Y. (2014). *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Arsyam, M. (2021). *BAHAN AJAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN*.
- Hadijaya, Y. (2012). *Administrasi pendidikan*.
- Hardiansyah, H., & Fahmi, A. (2018, September). *Strategi Tata Kelola Administrasi Pada Perguruan Tinggi Berbasis Electronic Records*. In *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala* (pp. 246-250).
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). *Strategi Komunikasi Pembelajaran Di Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Masa Pandemi*. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(02), 231- 241.
- Kadir, A. (2013). *Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC*. *Shautut Tarbiyah*, 19(1), 66-83.
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)
- Afriansyah, H. (2019). *Administrasi Peserta Didik*.
- Arsyam, M. (2020). *Manajemen pendidikan islam*.
- Sapada, A. O., & Arsyam, M. (2020). *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menurut Pandangan Islam*.
- Zakirah, Z., Jumliadi, J., Arsyam, M., Herianto, H., Rusli, M., & Alwi, A. M. *Implementation of The Islamic Local Regulations in Bulukumba Regency*.
- Zakirah, Z., Arsyam, M., HERIANTO, H., & Umar, K. (2020, December 20). *PENDIDIKAN DASAR (KUTTAB) MASA DAULAH ABBASIYAH (132-232 H / 750-847 M)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7t8bs>
- Jumliadi, J., Zakirah, Z., Arsyam, M., Alwi, A. M. S., & Fadhil, M. *Pembelajaran Dirumah Dalam Lingkungan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid 19*.
- Herianto, H. (2020). *Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi Dan Prestasi Akademik terhadap Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama*.
- Kristiawan, M., & Asvio, N. (2018). *Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah*. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 86-95.